

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL**

(Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2010-2011)

ARTIKEL ILMIAH



Oleh:

ADHEK AMELIA

NIM : 2009.310.322

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2013

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Adhek Amelia
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 03 Oktober 1990
N.I.M : 2009310322
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Pengaruh Pendapatan Alokasi Daerah dan Dana Alokasi
Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja
Modal

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing
Tanggal :



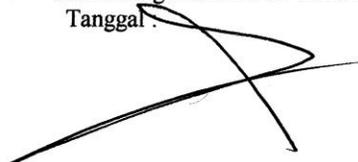
(Dra. Diah Ekaningtias, Ak., MM)

Co. Dosen Pembimbing
Tanggal :



(Triana Mayasari, SE., M.Si., Ak)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Tanggal :



(Supriyati, SE., Ak., M.Si)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL**
(Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2010-2011)

Adhek Amelia

STIE Perbanas Surabaya
2009310322@student.perbanas.ac.id
Jl. Nginden semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

This study aimed to examine the influence of Revenue and the General Allocation Fund for Capex budget allocation districts/cities in East Java, with a sample of 38 regencies/cities, but there are data that data must be extreme outliers and the number of samples to 37 districts/cities in the 2010-2011 test results showing that revenue (PAD) does not significantly influence the allocation of capital expenditures for 0280>0000 and the results of testing of the General Allocation Fund (DAU) shows that the DAU affects the allocation of capital expenditure for 0000<0000. Effect of revenue (PAD) of the Capital Expenditures Fiscal Federalism Based on the theory that the budget revenue and expenditure, can be interpreted as increasing the independence and creativity of local governments to explore, develop and manage potential areas for the public welfare. Effect of General Allocation Fund (DAU) for Capital Expenditures Fiscal Federalism Based on the theory that a form of decentralization in local government is the establishment of a plan for the allocation of economic resources in the form of budget. Local budget is the means used to achieve attainment increased productivity, growth, economic development and the improvement of productivity and income per capita in the pursuit of social welfare.

Keywords: Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Latar balakang

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun sektor non keuangan. Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip-prinsip otonomi daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Purnamawati, 2006).

Era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Maharani, 2010). Meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran Belanja Modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah.

Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah ke Pemda disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang

secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum. Upaya peningkatan kemandirian daerah bahwasanya pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi Belanja Modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007).

Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, menjelaskan bahwa salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat ditarik permasalahan yang difokuskan pada penelitian ini antara lain :

Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur?

Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur?

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diidentifikasi, maka penelitian ini bertujuan untuk :

Mengetahui signifikansi pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Mengetahui signifikansi pengaruh dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur .

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Fiscal federalism theory

Teori *fiscal federalism* menjelaskan bahwa penyusunan anggaran harus berbasis pada kebutuhan dari masyarakatnya. Logika penjelasannya adalah bahwa penerapan desentralisasi menyebabkan pemerintah daerah akan lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga lebih mengetahui informasi tentang kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah daerah juga akan lebih mengetahui sumberdaya dan sumber ekonomi daerah. Berbasis pengetahuan tentang kebutuhan dan sumber daya dan ekonomi inilah yang digunakan untuk menyusun anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang penyusunannya dilandasi pengetahuan tentang informasi sumberdaya serta ekonomi akan menghasilkan rencana pembangunan yang realistis , artinya APBD diharapkan mampu menjadi alat dalam mendorong peningkatan capaian layanan yang lebih baik sesuai kebutuhan masyarakat.

Teori *fiscal federalism* juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah

seharusnya mampu menjalankan anggaran daerah dengan lebih efisien dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Efisiensi anggaran akan dicapai karena pemerintah daerah dalam memobilisir, memberdayakan dan mengalokasikan sumber daya daerah, akan disesuaikan dengan kebutuhan layanan masyarakatnya. Pemerintah daerah juga akan bersifat sangat bijaksana dan berusaha untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi publik yang efektif dan efisien berdasarkan pada *collective preferences* dari masyarakatnya (Oates, dalam Agus, 2011) Desentralisasi diharapkan akan mendorong *local experience* dari pemerintah daerah, dengan mempelajari pengalaman penerapan desentralisasi dari daerah lain. Desentralisasi juga diharapkan akan mewujudkan *local accountability*, yakni mendorong pemerintah daerah untuk mampu mendistribusikan dan mengalokasikan sumberdaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan memperhatikan hak-hak masyarakatnya.

Otonomi daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada hakikatnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Halim, 2001).

Tujuan otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan potensi daerah secara optimal,

terpadu, nyata, dinamis, dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Halim, 2001).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Data yang tertuang dalam APBD dapat dilihat kondisi keuangan Pemerintah daerah. Disisi pendapatan, dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan dapat dilihat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi nilainya semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Disisi pengeluaran dapat dilihat kecenderungan pola Belanja Daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti Belanja Modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti Belanja Pegawai. (Dodik, 2008)

Klasifikasi belanja

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Menurut kelompok belanja terdiri dari:

Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

Belanja Pegawai,

Bunga,
Subsidi,
Hibah,
Bantuan Sosial,
Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga,

Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok Belanja Langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

Belanja Pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset dan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Isdijoso, 2002). Wujud dari desentralisasi fiskal

adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2009).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian anggaran Belanja Modal

Berdasarkan teori *fiscal federalism* bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dapat dimaknai dengan semakin tingginya kemandirian dan kreativitas pemerintah daerah dalam menggali, mengembangkan dan mengelola potensi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Kemandirian daerah dapat diukur dengan tingginya jumlah penerimaan PAD yang didapat oleh setiap daerah, semakin tinggi jumlah PAD maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi daerah melalui pengalokasian belanja modal. Belanja Modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran Belanja Modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil, sedangkan daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan Belanja Pegawai (Halim, 2009).

Hubungan Dana Alokasi Umum dengan alokasi Belanja Modal

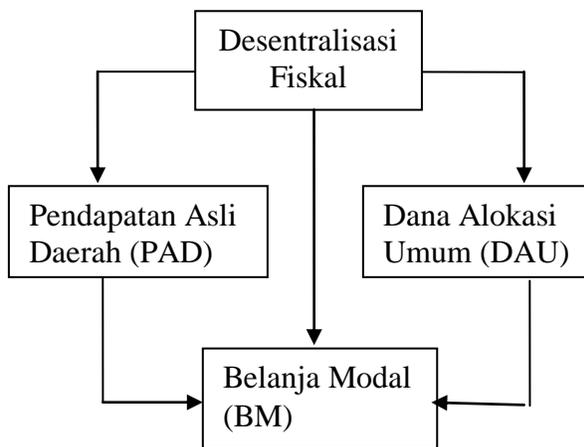
Berdasarkan teori *fiscal federalism* bahwa wujud dari penerapan desentralisasi dalam pemerintah daerah adalah penetapan rencana atas alokasi sumber daya ekonomi dalam bentuk anggaran daerah. Anggaran daerah adalah sarana yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian peningkatan produktivitas, pertumbuhan, pengembangan ekonomi serta peningkatan produktivitas dan pendapatan perkapita dalam upaya

pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin besar tingkat penerimaan DAU maka semakin besar pula tingkat ketergantungan daerah tersebut. Pemberian dana bantuan ini diupayakan dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal di setiap daerah

RERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dalam kemampuannya untuk memprediksi Belanja Modal berdasarkan teori *fiscal federalism* yang disajikan pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran gambar 1.1 menunjukkan variabel bebas adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, sedangkan variabel terikatnya adalah Belanja Modal. Maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menguji teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan datanya dianalisis menggunakan prosedur statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis.

Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan, dari laporan realisasi anggaran ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU).

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Batasan Penelitian

Batasan Waktu

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dua Tahun yang dimulai dari Tahun Anggaran 2010 sampai tahun anggaran 2011 dikarenakan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) PP.no.71 tahun 2010 tanggal berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010.

Batasan Daerah

Batasan daerah dalam penelitian ini adalah hanya meneliti Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Batasan variabel

Batasan variabel dalam penelitian ini yaitu hanya terdiri dari 3 variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

Identifikasi Variabel

Berdasarkan rancangan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka variabel dalam penelitian ini akan diidentifikasi sebagai berikut :

Variabel Dependen: Belanja Modal.

Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, berikut adalah definisi dan pengukuran variabel yang digunakan:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada

pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar
Dimana
Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset dan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010 sampai 2011 dengan alasan ketersediaan data.

Sampel adalah bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian (Mason dan Douglas, 1996). Sampel dalam penelitian ini adalah 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.RI wilayah Jawa Timur,

dari laporan Realisasi anggaran ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU).

Metode pengumpulan data yaitu dengan metode *total sampling* (sampling jenuh), yaitu keseluruhan jumlah populasi dijadikan sampel. Berikut adalah sampel yang dijadikan penelitian.

Tabel 1.1
DATA APBD SELURUH PROVINSI
JAWA TIMUR

No	Nama Daftar Kab/kota	No	Nama Daftar Kab/kota
1.	Kab.Bangkalan	20.	Kab.Probolinggo
2.	Kab.	21.	Kab.Sampang
3.	Banyuwangi	22.	Kab.Pacitan
4.	Kab. Blitar	23.	Kab.Ngawi
5.	Kab.Bojonegoro	24.	Kab.Sidoarjo
6.	Kab.Bondowoso	25.	Kab.Situbondo
7.	Kab.Gresik	26.	Kab.Sumenep
8.	Kab.Jember	27.	Kab.Trenggalek
9.	Kab.Jombang	28.	Kab.Tuban
10.	Kab.Kediri	29.	Kab.Tulungagung
11.	Kab.Lamongan	30.	Kota Batu
12.	Kab.Lumajang	31.	Kota Blitar
13.	Kab.Madiun	32.	Kota Kediri
14.	Kab.Magetan	33.	Kota Madiun
15.	Kab.Malang	34.	Kota Malang
16.	Kab.Mojokerto	35.	Kota Mojokerto
17.	Kab.Nganjuk	36.	Kota Pasuruan
18.	Kab.Pemekasan	37.	Kota Probolinggo
19.	Kab.Pasuruan	38.	Kota Surabaya
	Kab.Ponorogo		

Subyek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah propinsi Jawa Timur. Jumlah Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 38 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Data yang dianalisis

oleh penulis adalah Laporan Hasil Pemeriksaan per Kabupaten/Kota tahun anggaran 2010 sampai dengan 2011 sehingga total keseluruhan sampel sebesar 76 Kabupaten/Kota.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 2002). Langkah analisis yang akan di lakukan dengan menggunakan alat bantu software SPSS 16.0. Tahap-tahap pengujiannya dilakukan sebagai berikut:

Melakukan uji statistic deskriptif
Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antara variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

Melakukan uji normalitas data
Menurut Ghozali (2006 : 110), “uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil”.

Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan uji Kolmogrov Smirnov dapat dilihat dari :

Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas < 0,05, maka data residual tidak terdistribusi normal,

Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas > 0,05, maka data residual terdistribusi normal.

Analisis Regresi Berganda (*multiple regression*)

Analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh variable bebas (*independent variable*) terhadap variable terikat (*dependent variable*). Dimana analisisnya adalah :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e_1$$

Dimana:

Y = Belanja Modal
 α = Konstanta
 $b_1 \dots b_2$ = Koefisien Regresi
X1 = Pendapatan Asli Daerah
X2 = Dana Alokasi Umum
e = error

Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (*R Squared*) menunjukkan seberapa besar prosentase variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. Nilai R^2 terletak antara 0 dan 1, jika R^2 semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam variable independen.

Melakukan uji hipotesis

Teknik pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari *variable independent* terhadap *variable dependent* dengan menggunakan uji F dan uji t.

a) Uji signifikan (uji statistic F)

Pengujian ini menggunakan hipotesis pertama. Untuk melakukan uji F maka ada beberapa langkah yang diperlukan, yaitu:

Menyusun perumusan hipotesis.

H0 : $\beta_i = 0$ artinya seluruh variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen.

H1 : $\beta_i \neq 0$ artinya seluruh variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Menentukan tingkat signifikansi uji F dengan tingkat signifikan 0,05

Uji parameter individual (uji statistic t)

Pengujian ini menggunakan hipotesis kedua. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap masing-masing variabel yang terdapat pada model yang terbentuk, untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang ada di model parsial mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan uji t :

Menyusun perumusan hipotesis.

H0 : $\beta_i = 0$ artinya seluruh variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H1 : $\beta_i \neq 0$ artinya seluruh variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Menentukan tingkat signifikansi uji t dengan tingkat signifikan 0,05

Gambaran Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah propinsi Jawa Timur. Jumlah

Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 38 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Data yang dianalisis oleh penulis adalah Laporan Hasil Pemeriksaan per Kabupaten/Kota tahun anggaran 2010 sampai dengan 2011 sehingga total keseluruhan sampel sebesar 76 Kabupaten/Kota. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *total sampling* (sampling jenuh), yaitu keseluruhan jumlah populasi dijadikan sampel.

Sampel dalam penelitian ini terdapat data ekstrim, sehingga peneliti mengeluarkan sebagian sampel sehingga jumlah keseluruhan yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 74 Kabupaten/Kota. Tabel berikut akan memperlihatkan seleksi sampel yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 1.2
SELEKSI SAMPEL

Jumlah sampel tahun 2010	38
Jumlah sampel tahun 2011	38
Total sampel keseluruhan	76
Pengurangan sampel (outlier): Terdapat data ekstrim	2
Jumlah akhir sampel	74

Analisis data

Analisis dari hasil penelitian, dengan menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan objek penelitian yang diteliti dan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik yaitu SPSS versi 16.0. Alat tersebut digunakan untuk membantu mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen yang akan diteliti antara lain

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) apakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal, baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Analisis deskriptif

Analisis Deskriptif akan memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, sum.

Jumlah data pada setiap variabel (N) sebanyak 37 data di setiap tahun. Data tersebut didapatkan dari jumlah sampel tahun 2010 sampai 2011 yang digunakan sebanyak 76 Kabupaten/Kota namun yang mempunyai rentang diluar -3 sampai +3 terdapat dua Kabupaten/Kota sehingga objek penelitian hanya dilakukan 74 Kabupaten/Kota.

Deskriptif Belanja modal

Hasil dari pengolahan SPSS setelah outlier menunjukkan bahwa nilai minimum BM di Jawa Timur tahun 2010 sebesar 51403 dan nilai maximum 270603, memiliki rata-rata sebesar 119172.59 dengan nilai standar deviasi sebesar 50203.079 terlihat nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga rentan sampel jauh dan dapat dikatakan bahwa nilai BM bagus. Tahun 2011 nilai minimum BM di Jawa Timur sebesar 50302 dan nilai maximum 291757 dengan rata-rata sebesar 154269.27 dengan nilai standar deviasi sebesar 56003.794. Rata-rata BM meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 120,213 dengan total BM juga meningkat sebesar 3,969,115 artinya bahwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur sudah berusaha untuk mengembangkan potensi daerah dengan

meningkatkan kualitas layanan publik dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Deskriptif Pendapatan Asli Daerah

Nilai minimum PAD di Jawa Timur tahun 2010 sebesar 17735 dan nilai maximum 356161 dengan rata-rata sebesar 76775.95 dengan nilai standar deviasi sebesar 58941.442 terlihat nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga rentan sampel jauh dan dapat dikatakan bahwa nilai PAD bagus. Tahun 2011 nilai minimum PAD di Jawa Timur sebesar 30241 dan nilai maximum 484313 dengan rata-rata sebesar 105159.35 dengan nilai standar deviasi sebesar 82358.283. Rata-rata PAD meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 79,875.08 dengan total PAD juga meningkat sebesar 2,642,075.95 artinya bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur telah dapat meningkatkan kemandirian daerah yang tercermin dari meningkatnya jumlah PAD selama satu tahun.

Deskriptif Dana Alokasi Umum

Nilai minimum DAU di Jawa Timur tahun 2010 sebesar 223964 dan nilai maximum 967107 dengan rata-rata sebesar 525421.81 dengan nilai standar deviasi sebesar 171700.995 terlihat nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga rentan sampel jauh dan dapat dikatakan bahwa nilai DAU bagus. Tahun 2011 Nilai minimum DAU di Jawa Timur sebesar 237492 dan nilai maximum 1058648 dengan rata-rata sebesar 580736.89 dengan nilai standar deviasi sebesar 191214.156. Rata-rata DAU meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 529,539 dengan total DAU juga meningkat sebesar 17,483,037 artinya bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk dapat pemeratakan kemampuan keuangan daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, namun dengan

meningkatnya jumlah DAU ini maka Provinsi Jawa Timur juga dapat dikatakan sebagai daerah yang masih tergantung dengan pemerintah pusat.

Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independent dan variabel dependent terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov, prosedur pengujian normalitas adalah menguji nilai residualnya.

Nilai Signifikan yang dihasilkan dari uji normalitas sebelum outlier adalah kurang dari 0.05 yaitu 0.020 hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti model regresi belum memenuhi asumsi normalitas, dan setelah data di outlier nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji normalitas setelah data outlier dikeluarkan adalah lebih dari 0.05 yaitu 0.767, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas, dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi linier bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). sehingga dapat diketahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda karena variabel independen yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu.

Tabel 1.3

REGRESI LINIER BERGANDA

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi
Konstanta	47573.851
Pendapatan Asli Daerah	.094
Dana Alokasi Umum	.146

Berdasarkan nilai estimasi koefisien regresi, maka model persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Persamaan Regresi :

$$Y = 47573.851 + 0.094 \text{ PAD} + 0.146 \text{ DAU} + e$$

Dengan penjelasan sebagai berikut:

α = konstanta sebesar 47573.851 menyatakan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2) dianggap konstan, maka rata-rata Belanja Modal Kabupaten/Kota adalah sebesar 47.573.851.000 rupiah

b_1 = 0.094 menunjukkan apabila Pendapatan Asli Daerah (X1) berubah sebesar satu satuan, maka Belanja Modal (Y) akan berubah sebesar 94.000 dengan asumsi bahwa besarnya nilai Dana Alokasi Umum (X2) konstan. Tanda positif pada nilai koefisien regresi melambangkan hubungan yang searah antara X1 dan Y, artinya apabila Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat, maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan 94.000

b_2 = 0.146 menunjukkan apabila Dana Alokasi Umum (X2) berubah sebesar satu satuan, maka Belanja Modal (Y) akan berubah sebesar 146.000 dengan asumsi bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (X1) konstan. Tanda positif pada nilai koefisien regresi melambangkan hubungan searah antara X2 dan Y, artinya apabila Dana Alokasi Umum meningkat, maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 146.000

Koefisien determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, juga

untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.3
KOEFISIEN DETERMINASI

Model	Adjust R Square
1	.280

Hasil koefisien determinasi dari nilai adjust R square sebesar 0.280 setelah *outlier*, memiliki arti bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mampu menjelaskan Belanja Modal sebesar 28 persen dan sisanya 72.0 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar kedua variabel bebas yang digunakan dalam model regresi.

Uji Simultan (Uji F)

Uji secara simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama – sama memiliki pengaruh atau tidak, dengan cara melihat *Output* SPSS dan melihat pada kolom signifikan.

Tabel : 1.4
UJI SECARA SIMULTAN (UJI F)

Model	F	Sig.
Regression	15.191	.000
Residual		

Hasil uji ANOVA atau Uji F setelah *outlier*, didapat nilai F hitung sebesar 15.191 dengan probabilitas 0.000, karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Modal atau dapat dikatakan bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Uji Partial (Uji t)

Uji secara partial digunakan untuk menguji masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel : 1.5
UJI PARTIAL (UJI T)

Model	t	Sig.
1 (Constant)	2.691	.009
PAD	1.079	.284
DAU	4.215	.000

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

PAD tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal sebesar 0.284 atau 28.4 persen karena nilai 28.4 persen jauh diatas 5 persen.

DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal sebesar 0.000 atau 0 persen dan signifikan secara uji statistika, karena $0.000 < 0.005$.

PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dengan sampel 38 Kabupaten/Kota, namun terdapat data ekstrim sehingga data harus di outlier dan jumlah sampel menjadi 37 Kabupaten/Kota pada tahun 2010-2011 yang menunjukkan bahwa hasil pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dan hasil pengujian Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Berdasarkan teori *fiscal federalism* bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dapat dimaknai dengan semakin tingginya kemandirian dan kreativitas pemerintah daerah dalam menggali, mengembangkan dan mengelola potensi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah dapat diukur dengan tingginya jumlah penerimaan PAD yang didapat oleh setiap daerah, semakin tinggi jumlah PAD maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut dalam menggali sumber daya daerah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengalokasian belanja modal. Belanja Modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran Belanja Modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Hasil pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini diduga karena sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur kurang dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam mengatur keuangan dan menggali sumber daya daerah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil pengujian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh David dan Priyo (2007) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian terdahulu.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Berdasarkan teori *fiscal federalism* bahwa wujud dari penerapan desentralisasi dalam pemerintah daerah adalah penetapan rencana atas alokasi sumber daya ekonomi dalam bentuk anggaran daerah. Anggaran daerah adalah sarana yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian peningkatan produktivitas, pertumbuhan, pengembangan ekonomi serta peningkatan produktivitas dan pendapatan perkapita dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin besar tingkat penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) maka semakin besar pula tingkat ketergantungan daerah tersebut. Pemberian dana bantuan ini diupayakan dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal di setiap daerah, sehingga pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat. Hasil pengujian Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini diduga karena sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih tergantung dengan pemerintah pusat. Hasil pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Eni (2012), David dan Priyo (2007) dan Kesit (2004), Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal hal ini berarti sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki tingkat kemandirian yang rendah atau belum maksimal dalam mengelola keuangan daerah dan belum dapat menggali sumber daya daerah sehingga pemasukan penerimaan PAD relative kecil. Sehingga hipotesis pertama dapat dijawab bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal, artinya bahwa jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat oleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur relative besar, hal ini berarti sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat memberikan dana bantuan berupa DAU yang diharapkan dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal di setiap daerah, sehingga pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat. Sehingga hipotesis kedua dapat dijawab bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang selanjutnya memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi berikutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

Data untuk menghitung formula Dana Alokasi Umum kurang lengkap terutama mengenai Indeks Kemahalan Konstruksi tahun 2010

Terdapat data ekstrim yaitu Kota Surabaya dalam penelitian ini, sehingga sampel berkurang dari 38 Kabupaten dan 9 Kota menjadi 37 Kabupaten dan 8 Kota selama dua tahun.

Saran

Hasil penelitian yang disampaikan ini masih terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna. Sehingga penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Diharapkan pemda lebih memaksimalkan lagi potensi daerah yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah beberapa variabel lainnya untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah, dan PDRB.

Untuk penelitian berikutnya dapat mencoba meneliti Kabupaten/Kota yang berada diluar Jawa, seperti Kalimantan, Sumatera atau yang lainnya.

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan data yang lebih lengkap

dengan rentan periode yang lebih panjang sehingga mampu untuk dilakukan generalisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim, 2007. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ketiga: Salemba Empat, Jakarta.
- Agus Samekto, 2011. "Dampak Desentralisasi Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah daerah", Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya Malang
- Ayu Madyaningtyas. 2011. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah". Skripsi Sarjana Tak Diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". SNA X.
- David Harianto, dan Priyo Hariadi. 2007. "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan perkapita", Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar 26-28 juli 2007.
- Diah Ayu Kusumadewi, dan Arief Rahman. 2007. "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia". Jurnal JAAI Vol 11, No 01 Juni.
- Eni Suryanti (2012). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah" (Studi Empiris pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah), Jurnal Akuntansi 1-16. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM*

- SPSS. Edisi 5. 2011. Badan Penerbit Universitas diponegoro.Semarang.
- Indra Bastian, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kesit Bambang Prakoso,. 2004. “Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah” (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY). JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118
- Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur.
- Mardiasmo, 2002.*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mursyidi, 2009. *Akuntansi pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama
- Priyo Hariadi. 2006. “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah” (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- _____ Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia
- _____ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- _____ Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dae

LAMPIRAN 1

DATA SEBELUM OUTLIER

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	76	50302.0	1034993.0	153887.539	125224.1035
PAD	76	17735.0	1886514.0	125352.197	236273.4815
DAU	76	223964.0	1058648.0	556048.237	181083.2439
Valid N (listwise)	76				

Regression

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU, PAD ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.704 ^a	.495	.482	90164.1793

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

LAMPIRAN 2

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.826E11	2	2.913E11	35.833	.000 ^a
	Residual	5.935E11	73	8.130E9		
	Total	1.176E12	75			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	49341.165	33671.412		1.465	.147
	PAD	.344	.045	.648	7.572	.000
	DAU	.111	.059	.160	1.867	.066

a. Dependent Variable: BM

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.89538670E4
Most Extreme Differences	Absolute	.174
	Positive	.174
	Negative	-.148
Kolmogorov-Smirnov Z		1.521
Asymp. Sig. (2-tailed)		.020

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

LAMPIRAN 3

DATA SETELAH OUTLIER

Descriptives

Tahun2010

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	37	51403	270603	119172.59	50203.079
PAD	37	17735	356161	76775.95	58941.442
DAU	37	223964	967107	525421.81	171700.995
Valid N (listwise)	37				

Tahun 2011

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	37	50302	291757	154269.27	56003.794
PAD	37	30241	484313	105159.35	82358.283
DAU	37	237492	1058648	580736.89	191214.156
Valid N (listwise)	37				

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		74
Normal Parameters ^a	Mean	-5.0237048E3
	Std. Deviation	4.92890063E4
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.046
Kolmogorov-Smirnov Z		.666
Asymp. Sig. (2-tailed)		.767
a. Test distribution is Normal.		

LAMPIRAN 4

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU, PAD ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BM

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.547 ^a	.300	.280	47259.556128

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67855674793.217	2	33927837396.609	15.191	.000 ^a
	Residual	158576060825.445	71	2233465645.429		
	Total	226431735618.662	73			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

LAMPIRAN 5

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47573.851	17679.448		2.691	.009
	PAD	.094	.087	.122	1.079	.284
	DAU	.146	.035	.478	4.215	.000

a. Dependent Variable: BM

Tabel 4.10
KEBUTUHAN FISKAL DANA ALOKASI UMUM

No	Kabupaten/Kota	LUAS DAERAH	PROYEKSI	IPM		IKK	
		(Km)	PENDUDUK	2010	2011	2010	2011
1	Kab. Bangkalan	1,303	911,863	64.51	65.36		90.21
2	Kab. Banyuwangi	3,599	1,564,833	68.89	39.61		86.04
3	Kab. Blitar	1,753	1,122,922	73.67	74.45		83.48
4	Kab. Bojonegoro	2,314	1,216,781	66.92	68.33		81.34
5	Kab. Bondowoso	1,572	740,917	62.94	63.45		83.38
6	Kab. Gresik	1,238	1,183,665	74.47	75.21		84.59
7	Kab. Jember	3,349	2,345,851	64.95	65.77		82.95
8	Kab. Jombang	1,114	1,209,172	72.70	73.57		79.35
9	Kab. Kediri	3,457	1,508,206	71.75	72.44		85.06
10	Kab. Lamongan	1,759	1,185,693	69.63	70.13		78.69
11	Kab. Lumajang	1,806	1,012,121	67.82	68.45		86.78
12	Kab. Madiun	1,011	666,004	70.18	70.74		83.28
13	Kab. Magetan	705	623,933	72.72	73.40		85.29
14	Kab. Malang	3,457	2,459,982	70.54	71.33		84.16
15	Kab. Mojokerto						

		974	1,031,213	73.39	74.18		79.48
16	Kab. Nganjuk	1,284	1,022,752	70.76	71.43		81.96
17	Kab. Ngawi	1,392	822,366	68.82	69.72		84.30
18	Kab. Pacitan	1,418	543,924	72.08	72.76		87.89
19	Kab. Pamekasan	797	800,396	64.60	65.16		90.16
20	Kab. Pasuruan	1,487	1,520,978	67.61	68.28		82.59
21	Kab. Ponorogo	1,487	860,093	70.29	71.20		86.42
22	Kab. Probolinggo	1,659	1,102,412	62.99	63.67		82.25
23	Kab. Sampang	1,230	882,711	59.70	60.49		93.01
24	Kab. Sidoarjo	719	1,952,421	76.35	77.03		89.02
25	Kab. Situbondo	1,654	651,263	64.26	65.17		83.20
26	Kab. Sumenep	2,092	1,048,177	65.60	66.32		92.62
27	Kab. Trenggalek	1,245	678,206	73.24	74.12		88.36
28	Kab. Tuban	1,977	1,124,757	68.31	69.23		83.85
29	Kab. Tulungagung	1,151	995,729	73.34	73.91		84.30
30	Kota Batu	202	191,254	74.45	75.20		80.09
31	Kota Blitar	33	132,712	77.42	77.89		83.38
32	Kota Kediri	69	270,018	76.28	76.88		84.10
33	Kota Madiun	34	171,926	76.61	77.25		82.99
34	Kota Malang	110	824,858	77.20	77.83		85.44
35	Kota Mojokerto	20	120,873	77.02	77.47		79.05
36	Kota Pasuruan	38	187,310	73.45	74.07		82.31
37	Kota Probolinggo	54	218,283	74.33	75.02		78.94
38	Kota Surabaya	331	2,781,047	77.28	77.87		81.01

LAMPIRAN 6

Tabel 4.11
KAPASITAS FISKAL (PAD)

No	Kabupaten/Kota	PAD	
		2010	2011
1	Kab. Bangkalan	40,975,170,911	65,039,401,772
2	Kab. Banyuwangi	90,656,905,526	113,364,553,469
3	Kab. Blitar	63,888,553,129	76,190,965,173
4	Kab. Bojonegoro	79,891,483,832	164,585,991,460
5	Kab. Bondowoso	49,663,941,019	66,816,392,275
6	Kab. Gresik	167,771,869,035	273,975,992,140
7	Kab. Jember	150,935,737,792	182,494,390,158
8	Kab. Jombang	109,154,035,427	124,799,217,856
9	Kab. Kediri	72,006,347,302	96,820,637,689
10	Kab. Lamongan	95,244,807,228	99,545,629,500
11	Kab. Lumajang	77,540,295,110	84,336,944,496
12	Kab. Madiun	45,034,305,944	57,998,223,512
13	Kab. Magetan	51,964,929,106	61,760,661,908
14	Kab. Malang	130,465,915,607	172,333,275,999
15	Kab. Mojokerto	69,719,357,059	108,709,405,732
16	Kab. Nganjuk	79,507,391,611	94,553,242,448
17	Kab. Ngawi	27,489,942,064	61,539,122,182
18	Kab. Pacitan	29,488,179,487	48,359,915,660
19	Kab. Pamekasan	49,313,077,417	70,704,959,013
20	Kab. Pasuruan	100,309,476,757	155,276,540,400
21	Kab. Ponorogo	48,664,624,186	65,936,673,551
22	Kab. Probolinggo	46,024,665,848	75,654,859,911
23	Kab. Sampang	36,396,342,480	46,973,974,632
24	Kab. Sidoarjo	356,161,848,548	484,313,737,307
25	Kab. Situbondo	46,579,946,273	61,761,290,501
26	Kab. Sumenep	46,702,756,751	57,940,353,705
27	Kab. Trenggalek	53,553,783,139	63,084,029,481
28	Kab. Tuban	106,369,268,224	137,296,864,044
29	Kab. Tulungagung	94,380,356,787	124,517,804,186

30	Kota Batu	17,735,602,953	30,241,864,301
31	Kota Blitar	47,690,974,775	52,564,078,517
32	Kota Kediri	92,787,297,150	119,467,321,122
33	Kota Madiun	41,757,000,273	61,305,077,273
34	Kota Malang	113,490,265,808	185,818,563,982
35	Kota Mojokerto	31,596,313,387	42,165,056,510
36	Kota Pasuruan	34,101,032,333	45,213,899,175
37	Kota Probolinggo	45,715,475,874	57,455,035,686
38	Kota Surabaya	908,647,775,730	1,886,514,301,580

LAMPIRAN 7

Tabel 4.12
KAPASITAS FISKAL (DBH PAJAK)

No	Kabupaten/Kota	DBH PAJAK	
		2010	2011
1	Kab. Bangkalan	81,098,259,993	83,228,160,736
2	Kab. Banyuwangi	69,515,081,140	66,091,527,936
3	Kab. Blitar	48,393,391,759	44,759,461,948
4	Kab. Bojonegoro	127,689,938,920	128,967,427,259
5	Kab. Bondowoso	42,261,729,530	45,029,758,126
6	Kab. Gresik	159,435,102,279	140,044,480,573
7	Kab. Jember	80,658,551,460	82,772,767,152
8	Kab. Jombang	65,812,397,249	67,179,738,315
9	Kab. Kediri	118,912,573,527	95,300,377,956
10	Kab. Lamongan	69,432,220,224	81,951,282,019
11	Kab. Lumajang	39,143,385,527	38,770,671,145
12	Kab. Madiun	46,544,774,350	44,642,044,529
13	Kab. Magetan	36,280,752,435	41,725,946,940
14	Kab. Malang	113,018,877,873	86,416,538,157
15	Kab. Mojokerto	82,479,259,320	62,689,680,137
16	Kab. Nganjuk	60,565,603,822	60,606,999,473
17	Kab. Ngawi	51,833,484,001	54,589,373,843
18	Kab. Pacitan	34,189,845,445	39,745,664,051

19	Kab. Pamekasan	51,399,705,739	52,090,160,677
20	Kab. Pasuruan	70.883.816.533	81.711.033.419
21	Kab. Ponorogo	58,966,795,683	55,831,159,115
22	Kab. Probolinggo	51,154,714,818	67,583,821,597
23	Kab. Sampang	61,313,156,380	62,103,490,333
24	Kab. Sidoarjo	229,226,996,285	188,260,248,987
25	Kab. Situbondo	35,522,939,461	33,711,165,357
26	Kab. Sumenep	151,854,004,923	155,196,294,449
27	Kab. Trenggalek	46,349,652,556	44,709,399,882
28	Kab. Tuban	101,845,336,785	103,173,159,134
29	Kab. Tulungagung	55,570,616,828	48,039,137,788
30	Kota Batu	30,597,701,590	32,648,541,969
31	Kota Blitar	31,027,357,011	30,736,890,677
32	Kota Kediri	87,212,728,761	90,503,299,557
33	Kota Madiun	32,384,400,167	26,609,759,798
34	Kota Malang	97,349,991,438	58,885,119,834
35	Kota Mojokerto	33,577,955,724	31,987,712,770
36	Kota Pasuruan	30,267,603,444	28,215,494,526
37	Kota Probolinggo	37,139,303,214	35,122,009,821
38	Kota Surabaya	726,559,911,282	225,590,330,815

LAMPIRAN 8

Tabel 4.13
KAPASITAS FISKAL (DBH SDA)

No	Kabupaten/Kota	DBH SDA	
		2010	2011
1	Kab. Bangkalan	25,579,874,711	20,469,287,136
2	Kab. Banyuwangi	14,290,089,711	18,863,553,181
3	Kab. Blitar	15,783,631,726	18,811,968,812
4	Kab. Bojonegoro	169,441,103,806	222,766,366,511
5	Kab. Bondowoso	6,564,430,756	8,735,910,702
6	Kab. Gresik	5,967,385,513	25,022,084,903
7	Kab. Jember	7,104,049,614	9,816,512,372
8	Kab. Jombang	6,686,937,839	9,027,901,353

9	Kab. Kediri	6,827,254,766	9,017,905,563
10	Kab. Lamongan	6,854,940,778	9,123,460,523
11	Kab. Lumajang	6,871,965,488	9,049,088,709
12	Kab. Madiun	7,860,252,297	10,340,706,579
13	Kab. Magetan	6,004,618,504	8,701,812,400
14	Kab. Malang	35,437,157,831	41,481,985,099
15	Kab. Mojokerto	6,546,308,863	25,050,786,028
16	Kab. Nganjuk	6,932,479,392	9,088,022,336
17	Kab. Ngawi	6,771,423,535	9,735,009,796
18	Kab. Pacitan	6,570,881,005	8,834,874,408
19	Kab. Pamekasan	27,273,655,975	36,701,028,061
20	Kab. Pasuruan	127,648,570,975	106.523.830.719
21	Kab. Ponorogo	6,330,765,320	8,781,887,960
22	Kab. Probolinggo	6,620,651,586	8,812,258,902
23	Kab. Sampang	13,477,396,489	16,176,922,587
24	Kab. Sidoarjo	17,393,672,255	22,346,427,438
25	Kab. Situbondo	12,832,157,528	18,150,632,478
26	Kab. Sumenep	6,948,369,900	8,513,104,299
27	Kab. Trenggalek	6,610,393,689	8,762,036,817
28	Kab. Tuban	23,032,647,577	28,071,737,801
29	Kab. Tulungagung	18,226,047,268	25,729,718,886
30	Kota Batu	12,188,403,696	8,716,889,518
31	Kota Blitar	7,803,766,338	8,692,232,539
32	Kota Kediri	6,536,131,410	8,692,232,539
33	Kota Madiun	6,535,054,463	8,692,289,539
34	Kota Malang	26,285,366,561	38,915,616,530
35	Kota Mojokerto	6,536,131,410	8,701,562,714
36	Kota Pasuruan	6,536,131,410	8,692,232,539
37	Kota Probolinggo	6,536,131,410	8,676,788,787
38	Kota Surabaya	6,536,131,410	8,692,232,539

LAMPIRAN 9

Tabel 4.14
DAFTAR SAMPEL

No	Nama Daftar Kab/kota	No	Nama Daftar Kab/kota
1.	Kab.Bangkalan	20.	Kab.Probolinggo
2.	Kab. Banyuwangi	21.	Kab.Sampang
3.	Kab. Blitar	22.	Kab.Pacitan
4.	Kab.Bojonegoro	23.	Kab.Ngawi
5.	Kab.Bondowoso	24.	Kab.Sidoarjo
6.	Kab.Gresik	25.	Kab.Situbondo
7.	Kab.Jember	26.	Kab.Sumenep
8.	Kab.Jombang	27.	Kab.Trenggalek
9.	Kab.Kediri	28.	Kab.Tuban
10.	Kab.Lamongan	29.	Kab.Tulungagung
11.	Kab.Lumajang	30.	Kota Batu
12.	Kab.Madiun	31.	Kota Blitar
13.	Kab.Magetan	32.	Kota Kediri
14.	Kab.Malang	33.	Kota Madiun
15.	Kab.Mojokerto	34.	Kota Malang
16.	Kab.Nganjuk	35.	Kota Mojokerto
17.	Kab.Pemekasan	36.	Kota Pasuruan
18.	Kab.Pasuruan	37.	Kota Probolinggo
19.	Kab.Ponorogo		

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur